

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Demokrasi berarti pemimpin dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, berkala yang memberikan kebebasan calon untuk bersaing mendapatkan suara. Kebebasan untuk memilih pemimpin cerminan demokrasi yang lazim dilakukan sehingga dalam prosesnya terbebas dari tindakan kecurangan contohnya praktik politik uang, praktik politik uang menjadi cara cepat memperoleh dukungan hal ini lazim terjadi dan bukan menjadi fenomena langka dalam setiap pemilihan pemimpin.

Rakyat disebut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya, memperjuangkan hak dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hidup bernegara. Demokrasi yang kuat ada partisipasi yang bukan hanya karena kepentingan tapi termasuk proses publik yang matang sehingga keputusan tidak melebihi persetujuan oleh konsensus masyarakat (Faulks, 2021). Persoalan partisipasi menjadi tolak ukur pelaksanaan demokrasi, melalui partisipasi yang tinggi maka kualitas demokrasi juga berjalan beriringan namun sebaliknya.

Pemilu menjadi wujud nyata demokrasi yang penyelenggaraannya harus demokratis dari sekian banyak hak asasi warga negara yang prinsipil pemilu adalah salah satunya pemerintah juga melaksanakan pemilu merupakan keharusan melalui asas rakyat yang berkuasa. Pelaksanaan pemilihan secara langsung tidak semestinya mendorong masyarakat untuk aktif malahan masyarakat yang golput juga masih ada terjadi karena sikap apatis, cuek dan masa bodoh dengan

menganggap bahwa pejabat yang menduduki kursi pemerintahan tidak bertanggungjawab mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran salah satunya korupsi, hal lain karena masyarakat merasa dengan memilih juga tidak memberikan perubahan atas kehidupannya yang berubah hanya pemimpin nya saja. Sebagaimana hal-hal yang menyebabkan masyarakat masa bodoh atau apatis dalam kegiatan politik :

1. Sikap acuh tidak acuh
2. Tidak tertarik pada politik
3. Kurang mengerti masalah politik
4. Tidak yakin pada usaha dalam mempengaruhi kebijakan publik akan berhasil ( Arifin, 2015 ).

Partisipasi politik masyarakat secara langsung mempengaruhi keputusan politik salah satunya melalui pemilihan umum dan juga pemilihan kepala desa, pilkades diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) melalui panitia pemilihan tersebut tahapan-tahapan pilkades akan dilaksanakan lalu BPD akan bertindak sebagai pengawas sejatinya untuk menyukseskan pilkades pengawasan mandiri harus ada dari unsur-unsur masyarakat (karang taruna, kelompok perempuan, dan kelompok lainnya).

Pemilihan kepala desa merupakan bentuk demokrasi yang terjadi di desa, demokrasi lokal yang dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah hingga ke pemerintahan pusat untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang demokratis. Pemilihan kepala desa atau sering disebut pilkades merupakan peristiwa yang

terjadi setiap enam tahun sekali yang semarak dilaksanakan di desa penyelenggara yang diikuti oleh seluruh masyarakat sebagai bentuk partisipasi politik dalam proses pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan PNS kepala desa dari masyarakat biasa (Sofyan, 2021).

Makna desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang dibatasi wilayahnya untuk kemudian dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan tradisional diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Keberadaan desa sebagai kesatuan dari sejumlah penduduk yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri disebut juga organisasi masyarakat yang telah lama ada.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai realisasi demokrasi dengan mengikutsertakan peran masyarakat dalam pelaksanaannya, partisipasi politik masyarakat penting karena berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada kandidat terpilih, setiap masyarakat memiliki kriteria dan selera terhadap calon pemimpin mereka sehingga calon pemimpin yang bersaing dalam pemilihan harus mampu memenuhi kriteria tersebut untuk menang. Pemilihan kepala desa konon dianggap sebagai arena demokratis di desa karena terjadi kompetisi bebas, partisipasi warga, pemilihan langsung dengan prinsip *one person one vote* (satu orang satu suara) (Haluana'a, 2019).

Pilkades diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan membentuk panitia pemilihan meliputi perangkat desa, pengurus lembaga

desa dan tokoh masyarakat. Peranan panitia pemilihan dalam proses pendataan calon pemilih, penjaringan bakal calon kepala desa, pemungutan suara, perhitungan perolehan suara sampai dengan pelaporan hasil pemilihan kepala desa sehingga rekrutmen panitia pemilihan harus tokoh-tokoh yang berkompeten dan memiliki keterampilan agar proses tersebut berjalan lancar.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pemilihan Kepala Desa dalam Bab II Pelaksanaan Pasal 2 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Pemilihan kepala desa secara serentak satu kali atau bergelombang; dan
- b. Pemilihan kepala desa antar waktu.

Pada 29 September 2022 telah dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bintan, pelaksanaan pilkades yang dipilih secara langsung oleh warga diikuti oleh 21 desa dan 1 PAW disebut pemilihan kepala desa antar waktu dilakukan secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara. Pemilihan kepala desa antar waktu diatur dalam Undang-Undang Desa, Pelaksanaan PAW tidak jauh berbeda dengan pilkades langsung serentak namun PAW disusun lebih sederhana, melalui forum musyawarah desa akan memfasilitasi PAW lalu Kepala Desa terpilih akan melanjutkan sisa jabatan ketika masa jabatan berakhir maka akan dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak sesuai ketentuan (Adnan, 2021).

Pelaksanaan PAW jumlah pemilihnya lebih sedikit tidak sama dengan pilkades reguler. Pemilihnya hanyalah mereka yang punya hak suara dalam musyawarah desa yang dilaksanakan Badan Pemusyawaratan Desa.

Berikut ini nama-nama desa yang mengikuti pelaksanaan pilkades serta kepala desa terpilih yaitu :

Tabel 1.1 Nama Desa dan Kepala Desa Terpilih Per-Kecamatan

No	Kecamatan	Nama Desa	Kepala Desa Terpilih
1	Teluk Sebong	Berakit	Muhammad Darussalam
		Pengudang	Kamali
		Ekang Anculai	Zaili Adi
		Sebong Perih	Bahari
		Sri Bintang	Prayitno
2	Tambelan	Batu Lepuk	Bulhaji
		Kampung Melayu	Isbandi
		Desa Kukup	Agus Salim
		Pulau Pinang	Murtada
		Pengikik	Rajono
3	Mantang	Mantang Baru	Ramlan
		Mantang Lama	Mahmudin I
		Mantang Besar	Mansur Solor
4	Bintan Pesisir	Mapur	Abdul Razak
		Numbing	Herry Yudasantoso
		Air Glubi	Jumadil Aswan
5	Teluk Bintan	Pengujan	Zulfitri
		Bintan Buyu (PAW)	Irmansyah
6	Bintan Utara	Lancang Kuning	Yuane Risky Febrika
7	Sri Kuala Lobam	Kuala Simpang	M Hatta
8	Gunung Kijang	Teluk Bakau	Abdul Wahid
9	Toapaya	Toapaya	Asrianto

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan, 2022.

Sembilan kecamatan dari 10 kecamatan di Kabupaten Bintan melaksanakan pemilihan kepala desa. Kecamatan yang melaksanakan pemilihan kepala desa

serentak antara lain : Kecamatan Bintan Utara, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Teluk Sebong, Seri Kuala Lobam, Bintan Pesisir, Mantang, Toapaya dan Tambelan.

Proses pemilihan kepala desa telah berlangsung dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku seperti yang disampaikan Pj Sekretaris Daerah Bintan yang menjabat saat itu Ronni Kartika menjelaskan bahwa : “ Sesuai dengan tahapan jadwal yang diatur dalam Keputusan Bupati Bintan Nomor 113/II/2022 tentang penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang tahun 2022, batas akhir tahapan penyampaian gugatan keberatan hari Selasa tanggal 2 Oktober kemarin, kami belum menerima laporan ada yang menyampaikan gugatan keberatan” (sijoritoday.com, 2022).

Pelaksanaan pilkades serentak menggunakan dana yang bersumber dari APBDesa masing-masing menyesuaikan dengan kebutuhan desa dari tahapan awal hingga akhir terpilihnya calon kepala desa, setelah dilantik serentak oleh Bupati maka kepala desa terpilih resmi memegang jabatan sebagai kepala desa dan bertanggungjawab untuk mengemban tugasnya. Berikut ini perbandingan jumlah pemilih dan pengguna hak pilih di enam kecamatan dengan total 13 desa sehingga memperoleh jumlah persentase pengguna hak pilih sebagai berikut :

Tabel 1.2 Persentase Jumlah Pemilih Desa-Desa Lain

No	Nama Desa	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Persentase
1	Berakit	1.411	1027	72%
2	Pengudang	927	558	60%
3	Ekang Anculai	1453	1084	74%

4	Sebong Perih	2962	1883	64%
5	Sri Bintan	1613	1284	79%
6	Mapur	661	489	74%
7	Numbing	1842	1204	64%
8	Air Glubi	698	560	79%
9	Pengujan	1083	916	85%
10	Lancang Kuning	1.110	899	80%
11	Kuala Simpang	1.395	1.054	76%
12	Teluk Bakau	1714	1422	83%
13	Toapaya	1008	799	79%

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Bintan, 2022 (telah diolah kembali)

Desa Pengujan merupakan satu-satunya desa yang mengikuti pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan Teluk Bintan. Perbandingan persentase jumlah pengguna hak pilih Desa Pengujan dibandingkan dengan 13 desa lain paling tinggi dengan data jumlah pemilih 1.083 orang dan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 916 suara persentase sekitar 85%. Perbandingan antara pilkades periode 2016-2022 dengan periode 2022-2028 sebagai berikut :

Tabel 1.3 Perbandingan Pilkades 2016 dan 2022

Tahun	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Persentase (%)
2016	977	790	81 %
2022	1083	916	85%

Sumber : Laporan Pilkades Desa Pengujan 2016-2022 (telah diolah kembali).

Perolehan suara dari periode tahun 2016 dibandingkan periode tahun 2022 mengalami peningkatan 4 persen sehingga partisipasi masyarakat dalam pemberian suara aktif untuk kegiatan *voting*.

Berikut ini nama-nama kandidat calon kepala desa pada pilkades tahun 2022 di Desa Pengujan yaitu :

Tabel 1.4 Nama Kandidat Calon Kepala Desa

Nomor Urut	Nama Calon	Alamat
1	Zulfitri	Pengujan, RT 006 RW 003
2	Idrus	Pengujan, RT 008 RW 001
3	Marzuki	Pengujan, RT 008 RW 001
4	Ridwan Basuki	Pengujan, RT 005 RW 003

Sumber data : Laporan Pilkades Desa Pengujan, 2022.

Kandidat calon kepala desa nomor urut 1 Zulfitri merupakan kepala desa terpilih periode sebelumnya, Idrus merupakan mantan sekretaris desa dan menjadi tokoh masyarakat, Marzuki merupakan imam masjid dan guru mengaji, serta Ridwan Basuki sebagai masyarakat biasa namun di periode ini kali kedua mengikuti pemilihan dan tetap kalah. Dari 3 dusun yang ada dusun 1 diwakilkan oleh Marzuki dan Idrus, dusun 3 diwakilkan oleh Zulfitri dan Ridwan Basuki sedangkan dusun 2 tidak ada perwakilan dalam pencalonan kepala desa.

Jumlah penduduk Desa Pengujan pada September 2022 berjumlah 1.458 orang dengan jumlah pemilih sebanyak 1.083 orang yang tersebar di 3 TPS. Pemilih yang terdaftar dan hadir dalam pencoblosan ada 916 suara dari total pemilih yaitu 1.803 jadi ada 167 pemilih yang tidak mencoblos. Ketidakhadiran pemilih tersebut tentu atas dasar faktor penghambat sehingga tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara tapi belum tentu ketidakhadiran dalam pencoblosan menandakan pemilih



tidak mengikuti partisipasi politik yang lain misalnya dalam mengikuti kampanye, diskusi politik dan lainnya.

Berikut ini wawancara dengan tokoh agama di Desa Pengujan, Rahman mengatakan bahwa :

“Ketika acara penyampaian visi misi dikantor, dapat undangan tapi tidak pergi karena ada keperluan” (Wawancara dengan Rahman, 02 Februari 2023).

Waktu untuk penyampaian visi misi program calon mempertimbangkan kesibukan pemilih karena akan mempengaruhi suara yang akan mereka berikan ketika hari pemungutan suara. Berdasarkan wawancara dengan Nuryati warga masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih mengatakan bahwa :

“Terdaftar sebagai pemilih tetap dan ikut pemungutan suara, saya tidak tahu apa visi misi calon kades, saya juga tidak mengikuti kampanye karena malas dan tidak suka ikut kegiatan kampanye seperti itu” (Wawancara dengan Nuryati, 02 Februari 2023).

Kemudian wawancara ketua karang taruna Agus yang terdaftar sebagai pemilih tetap dan mengikuti pemungutan suara mengatakan bahwa:

“ Tahun ini di tempat kita pilkades kegiatan kampanye tidak untuk umum, sebatas hanya untuk mengumpulkan sebagian warga ada, untuk program yang saya ingat calon nomor 1 dengan program koperasi nya, lalu untuk 3 calon yang lain saya tidak ikut dan tidak tahu cuma ikut yang nomor 1 ini saja” (Wawancara, 02 Februari 2023).

Dari wawancara antara masyarakat biasa dan tokoh pemuda diambil kesimpulan bahwa jika Nuryati tidak mengetahui visi misi program dari semua kandidat, sedangkan Agus mengetahui program untuk calon nomor 1 saja sedangkan yang mengikuti pemilihan totalnya empat calon ada tiga calon yang tidak diketahui apa visi misi dan program mereka.

Dari total sekitar 85 persen masyarakat sudah berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa dengan jumlah yang tinggi masyarakat menyadari bahwa pilkades itu penting karena partisipasi dan pemahaman tentang pencoblosan sudah baik dilihat dari jumlah suara tidak sah hanya 8 suara dari 3 TPS dengan keterangan surat suara salah coblos.

Hal yang menarik dari pemilihan kepala desa di Desa Pengujan tahun 2022 dengan keikutsertaan masyarakat yang tinggi dalam pemberian suara (*voting*), berbanding terbalik dengan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kampanye. Masyarakat cenderung apatis terhadap isu-isu politik dengan rasa ingin tahu yang sedikit sehingga mayoritas masyarakat hanya sebagai pemberian suara saja.

Kampanye merupakan kegiatan untuk mengumpulkan pendukung sehingga melalui kampanye ini calon kandidat kepala desa dapat memperkirakan jumlah suara yang akan mereka terima. Agar mendapatkan dukungan dari masyarakat maka calon kepala desa akan berusaha untuk menarik simpati pemilih dengan melakukan strategi berkampanye (Efendi & Kurnia, 2020). Kampanye melalui proses komunikasi politik yang memperkenalkan calon kandidat kepada pemilih (masyarakat) untuk mencapai tujuan politik tersebut maka tim sukses akan melakukan iklan politik kepada masyarakat.

Kegiatan kampanye pilkades dilaksanakan selama 3 hari dengan melalui aktivitas-aktivitas seperti *door to door*, pemasangan baliho, dan penyampaian visi misi melalui media sosial. Terkhusus untuk kampanye *door to door* tidak melebihi 10 orang dilihat berdasarkan laporan panitia pemilihan kepala Desa Pengujan tahun 2022.

Kegiatan kampanye penting karena pada kesempatan ini masyarakat bisa mengenal calon kepala desa mereka, tapi kebanyakan masyarakat bahkan tidak mengetahui apa visi misi dan program kerja calon kepala desa tersebut. Sehingga mempertanyakan ketidaktahuan masyarakat tentang visi, misi dan program kepala desa namun keikutsertaan dalam pemberian suara tinggi.

Kampanye merupakan kegiatan untuk mengumpulkan pendukung sehingga melalui kampanye calon kandidat kepala desa dapat memperkirakan jumlah suara yang akan mereka terima. Agar mendapatkan dukungan dari masyarakat maka calon kepala desa akan berusaha untuk menarik simpati pemilih dengan melakukan strategi berkampanye (Efendi & Kurnia, 2020). Kampanye melalui proses komunikasi politik yang memperkenalkan calon kandidat kepada pemilih (masyarakat) untuk mencapai tujuan politik tersebut maka tim sukses akan melakukan iklan politik kepada masyarakat.

Pendataan tim sukses pada pilkades Desa Pengujan tahun 2022 tidak ada calon yang mendaftarkan tim sukses jadi panitia tidak mengetahui jumlah pasti dari tim sukses. Tim sukses hanya secara lisan dan tidak tertulis sehingga kegiatan yang dilakukan tidak terkoordinasi.

Pemberian semacam uang, sembako dan lain-lainnya menjadi motif segelintir masyarakat untuk memilih. Partisipasi dengan faktor seperti itu bukan hal baik untuk pelaksanaan demokrasi di desa. Keinginan untuk perayaan demokrasi melalui pilkades yang bersih tidak tercipta karena oknum-oknum yang melakukan cara kotor memenangkan suara. Indikasi pemberian uang dan sembako inilah yang memicu konflik antar calon kepala desa yang membawa barang bukti berupa

rekaman *voice note* diselesaikan secara musyawarah antar bersangkutan, panitia serta keamanan dan tidak berlanjut hingga ke tingkat yang lebih tinggi karena ternyata tidak terbukti.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Pengujan Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Tahun 2022”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimanakah Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Pengujan Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Tahun 2022 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa di Pengujan Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Tahun 2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Memberikan wawasan dan pengetahuan untuk penulis serta menjadi referensi pemikiran dalam kajian bidang pemerintahan dan politik terkhusus mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Selain itu

dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya serta mengembangkan teori yang sudah ada.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian secara praktis yaitu :

a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini peneliti dapat meningkatkan wawasan tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa terkhusus di Desa Pengujan Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan.

b. Bagi pemerintah

Khususnya bagi Pemerintah Desa Pengujan agar pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan datang partisipasi politik masyarakat lebih baik dari sebelumnya.

c. Bagi masyarakat

Sebagai pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa di Desa Pengujan Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan.